

## Selama 2020, Kejaksaan Agung Menangkap 146 Buronan

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung RI, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan, Kejaksaan telah berhasil meringkus 146 buronan tindak pidana. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Rapat Kerja Kejaksaan 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Melalui program tangkap buronan, telah menangkap sebanyak 146 buronan," ucap Burhanuddin secara virtual, Senin (14/12).

Sementara itu, dalam bidang pembinaan, Kejaksaan membentuk assessment center untuk menyeleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang berkualifikasi dan dilakukan secara terbuka.

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang berkualitas tetap dilakukan pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diselenggarakan secara virtual sebanyak 400 calon jaksa," tu-

turnya.

Burhanuddin memaparkan, raker Kejaksaan 2020 mengangkat tema "Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional." Berdasarkan tema tersebut, raker menjadi ajang konsolidasi segenap insan Adhyaksa untuk mendesain corak penegakkan hukum yang tepat sehingga mampu berkontribusi positif dalam akselerasi program pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan demikian diharapkan raker ini akan menghasilkan rekomendasi yang mendukung dan selaras dengan visi misi dan arah kebijakan Presiden dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat guna memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak akibat covid-19," tuturnya.

Burhanuddin menuturkan, rapat kerja ini merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kejaksaan di 2020 serta merumuskan arah kebijakan strategis institusi tersebut di 2021. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## Berantas Korupsi, Presiden Jokowi Minta Kejaksaan Perkuat Pengawasan Internal

Jokowi menegaskan ingin Kejaksaan melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir. Selain itu, sistem rekrutmen dan promosi harus dilakukan terbuka serta berbasis meritokrasi atau berdasarkan kemampuan dan prestasinya.

Agung RI, Sanitiar Burhanuddin mengatakan rapat kerja ini merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kejaksaan di 2020 serta merumuskan arah kebijakan strategis institusi tersebut di 2021.

"Raker Kejaksaan 2020 dilaksanakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan. Diikuti 4.386 warga Adhyaksa yang terdiri dari eselon satu, dua, tiga dan empat," tutup Burhanuddin.

### Promosi Dilakukan Terbuka

Jokowi menegaskan ingin Kejaksaan melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir. Selain itu, sistem rekrutmen dan promosi harus dilakukan terbuka serta berbasis meritokrasi atau berdasarkan kemampuan dan prestasinya.

"Pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekrutmen dan promosi harus dilakukan secara meritokratis dan transparan, terbuka," ujarnya.

Menurut Jokowi, integritas jaksa, wawasan kebangsaan dan kesiapan menghadapi masalah hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas su-

## PEMERIKSAAN MANTAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (kedua kanan) bersiap menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/12). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.



IDN/ANTARA

KOMNAS HAM PERIKSA DIRUT JASA MARGA Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (14/12). Selain Subakti Syukur, Komnas HAM juga menggali keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran terkait tewasnya enam orang Laskar FPI.

## KPK Telusuri Aliran Uang `Panas` dari Edhy Prabowo untuk Pihak Lain

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aliran uang dugaan suap perizinan ekspor benih lobster, yang diterima mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP) untuk pihak lain.

Diduga, ada pihak lain yang turut kecipratan uang panas perizinan ekspor benih lobster. Hal ini terungkap dari materi pemeriksaan terhadap dua saksi Sekretaris Pribadi (Sepri) Edhy Prabowo, Fidyah Yusri dan Anggia Putri pada Jumat (11/12). Fidyah dan Anggia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Edhy Prabowo.

"Para saksi diperiksa penyidik seputar pengetahuan saksi mengenai dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka APM (Andreau Pribadi Misanta) dan EP kepada pihak lain yang diduga bersumber dari perijinan ekspor benur di KKD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (14/12).

Penyidik juga memeriksa dua tersangka dalam kasus ini yaitu, Andreau Pribadi Misanta (APM) dan Amiril Mukminin (AM), pada Jumat kemarin. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk penyidikan tersangka Edhy Prabowo.

"Saksi APM diperiksa penyidik mengenai pengetahuan

saksi tentang pelaksanaan tugas tim uji tuntas/ due diligence kementerian KKP terkait ekspor benur lobster," beber Ali.

"Sedangkan saksi AM dikonfirmasi penyidik terkait pengetahuan saksi soal dugaan penerimaan uang yang diterima tersangka EP dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perijinan ekspor benih lobster," imbuhnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM). Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF); dan pihak swasta Amiril Mukminin (AM).

Sementara itu, dugaan pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJ1). Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur. ● mei

## DWP Kota Bekasi Rayakan Hari Jadinya Secara Virtual

KOTA BEKASI (IM) - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bekasi merayakan Dirgahayunya ke-21 (7 Desember) bertempat di Gedung Bale Patriot, Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (14/12).

Perayaan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Ke 21 Kota Bekasi ber-tema "Peran DWP dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga di Indonesia."

Acara Dirgahayu DWP ke 21 itu juga disarkan langsung melalui aplikasi Zoom Meeting diikuti di 12 Kecamatan Kota Bekasi dan diisi dengan beberapa kegiatan di antaranya, Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Ke-21, Pemotongan tumpeng, Webinar dari Rumah sakit Mitra Jatiasih, hingga pembagian Doorprize.

Turut Hadir pada acara tersebut, Sekretaris DPPPA, Ketua DWP Kota Bekasi, Ratna Dwi Anggraeni Widodo, Penaschat DWP Kota Bekasi Gunarti Effendi dan Wiwiek Hargono beserta Seluruh Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi, hingga jajaran Diskominfo Kota Bekasi. Acara dimulai dengan pem-

baan Surat Keputusan No. 261 tahun 2020 oleh Sekretaris DPPPA Kota Bekasi tentang pelantikan pengurus Dharma Wanita Kota Bekasi masa bakti 2019-2024 dan dilanjutkan dengan Sambutan dari ketua DWP Kota Bekasi, Ratna Dwi Anggraeni Widodo kepada para Anggota baru DWP Kota Bekasi.

"Walaupun di masa pandemi ini kita tetap berkegiatan namun harus memperhatikan protokol 3M seperti pembagian masker, pembagian nasi bungkus kepada masyarakat Kota Bekasi di 12 Kecamatan. Selamat kepada anggota yang sudah dikukuhkan semoga bisa terus berperan aktif dalam menjaga ketahanan keluarga," ujar Ratna dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (14/12).

Bergantian, pada acara yang sama sambutan dari Penaschat, Gunarti Effendi mengucapkan selamat kepada anggota yang telah dilantik. "Selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan semoga kedepannya Dharma Wanita bisa lebih maju lagi, semoga kaum perempuan bisa lebih maju lagi kedepan dalam meningkatkan kualitas khususnya kaum menengah ke bawah," tutupnya. ● mdl

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan dan penegakkan disiplin internal Kejaksaan terus diperkuat. Hal itu bertujuan agar profesionalitas insan adhyaksa yang menangani perkara dapat terjaga. Apalagi, ia meminta Kejaksaan harus bersih dan terdepan dalam pemberantasan korupsi.

"Pengawasan internal harus diefektifkan agar sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan bertindak profesional. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku. Untuk memperbaiki pelaku. Untuk memulihkan korban kejahatan," ucap Jokowi dalam rapat kerja Kejaksaan RI secara virtual, Senin (14/12).

Jokowi ingin Kejaksaan menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Karenanya lembaga tersebut harus bersih dan memiliki komitmen tinggi

terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakkan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional," imbuhnya.

Menurut Jokowi, pembenahan dari hulu hingga hilir di internal Kejaksaan dan relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekrutmen serta promosi terhadap jaksa harus dilakukan secara meritokratis dan transparan.

"Integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi Industri 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Jaksa

## Permasalahan UMP Karyawan Bintaro Bakery Diduga Mandek

JAKARTA (IM) - Bintaro Bakery satu unit usaha yang bergerak dalam penjualan roti/ kue ini yang berada di Jalan RC Veteran No 6, Bintaro, Jakarta Selatan, diduga tidak membayar upah karyawan sebagaimana UMP DKI Jakarta. Karyawan diduga hanya dibayar Rp. 1, 5 juta per bulan.

Terkait informasi tersebut, Sudin Tenaga Kerja Jakarta Selatan telah melakukan pemanggilan ke unit usaha tersebut. Namun sesuai pengakuan petugas yang diturunkan sudin terkait, Heru, melalui telpon dan pesan whatsapp mengatakan sulit mencari

data. Dan sampai berita ini diturunkan masalah terkait upah ini terkesan "mandek".

Petugas dari Sudin Naker Jaksel yang turun kelapangan, Heru, melalui telpon seluler dan whatsappnya, Senin (7/2), mengatakan bahwa terkait masalah upah, Bintaro Bakery telah memenuhi pemanggilan dinas melalui kuasa hukumnya.

Kuasa hukum telah telah menjelaskan permasalahan dan akan memberikan data pada Kamis (10/12).

Saat wartawan mempertanyakan kembali masalah tersebut pada Kamis, (10/12), melalui whatsapp Heru men-

gatakan, "Saya lagi tugas di luar, tadi pak Kevin yang mau menerima pihak manajemen, katanya jam setengah satu mau datang, maaf saya gak bisa nemanin," ujar Heru.

Heru menambahkan, "Saya habis telpon pak Kevin, katanya jam 2 mau datang."

Namun sampai berita ini turun tidak ada lagi penjelasan. Dan mengenai masalah upah ini terkesan "mandek".

Sebelumnya Kasudin Nakertrans Jaksel, Sudrajat meminta ke wartawan agar tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. ● ber

## Pemkot Bekasi Launching Pelayanan PBB Menggunakan Aplikasi Gotagihan Gojek

KOTA BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi meluncurkan Pelayanan PBB melalui aplikasi Gotagihan Gojek di Stadion Patriot Chandrabhaga, Senin (14/12). Acara tersebut, tentu membuat warga masyarakat menjadi semakin mudah dalam melakukan pembayaran.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota Bekasi telah berkerjasama dengan salah satu Start Up ternama yang ada di Indonesia yaitu 'Gojek' untuk memudahkan warga Kota Bekasi dalam urusan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya melalui handphone.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto launching kegiatan tersebut untuk menjadikan warga masyarakat semakin mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran hanya melalui gadget (handphone).

"Sekarang sudah semakin canggih, dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Gojek, kini pembayaran PBB sudah ada di dalam aplikasi Gojek.

Tinggal tekan nomor PBB nya langsung keluar tagihannya dan bisa dibayarkan menggunakan gopay," ucap Tri.

Di era yang terus berkembang ini, ucap Tri, tentu akan semakin menumbuhkan inovasi yang terbaru dan semakin berkembang, diikuti dengan teknologi yang canggih semua bisa melakukan apa saja hanya menggunakan ponsel.

Kemudahan pembayaran PBB yang disebut dalam aplikasi 'GOTAGIHAN' juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Gotagihan juga dapat dimanfaatkan untuk membayar berbagai jenis tagihan yakni, PLN, PDAM dan Multifinance.

Berikut adalah tata cara membayar PBB dan pajak retribusi lewat GoTagihan :

1. Buka Aplikasi Gojek
2. Pilih GoTagihan
3. Pilih Icon PBB untuk pembayaran PBB
4. Masukkan nomor ID / nomor tagihan
5. Lakukan konfirmasi

6. Masukkan PIN Rahasia GoPay

7. Setelah pembayaran berhasil swipe up untuk melihat detail pembayaran.

Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan juga kepada para undangan yang hadir, terutama untuk Camat dan Lurah untuk dapat memyosialisasikan Layanan Pembayaran PBB ini kepada warga masyarakat hingga ke tingkat RW dan RT.

"Untuk para camat dan lurah langsung segera sosialisasikan kepada para pamor yang sudah tersebar di tingkat RW, kalo bisa juga pamornya mengajaknya kepada pemegang RW nya di masing-masing elayah," tegas Tri dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (14/12).

Dalam acara tersebut hadir Staf Ahli Wali Kota, Asda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiah, Ikhsan TWUP4 Kota Bekasi dan Lurah. ● mdl

**PENGUMUMAN**  
PT. DARMO CONSTRUCTION MATERIALS

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (SIKULER) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. DARMO CONSTRUCTION MATERIALS tertanggal 11 Desember 2020, untuk membatalkan Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 dan menuntun:

**TUAN BENNY DARMOHARDJO**  
Alamat : J. Letjend Panjaitan Nomor 59, RT 011/RW. 003, Kelurahan Soklat, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat  
sebagai Likuidatornya, maka semua pihak yang masih mempunyai kepentingan dengan dan tagihan kepada Perseroan, diminta untuk menyelesaikannya secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada pihak Likuidator dengan alamat:

**PT. DARMO CONSTRUCTION MATERIALS**  
Jalan Di. Panjaitan Nomor 59, RT. 011 / RW. 003, Kel. Soklat, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat  
Subang, 15 Desember 2020  
Ttd  
Likuidator

**PT. GOWA HERMON**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")  
**PENGUMUMAN**

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham dalam Perseroan akan menyetujui dan menandatangani sebagai besaran saham miliknya kepada Pihak Ketiga ("Transaksi").

Untuk memenuhi kewajiban pengumuman sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki keberatan atas Transaksi tersebut dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini.

15 Desember 2020  
Direksi  
**PT. GOWA HERMON**  
Jl. Dahlia No. 42 F RT 005, RW 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI, Jakarta

**PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
PT. KIRAN RESOURCES INDONESIA (dalam Likuidasi) Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 03 Desember 2020 yang diadakan dalam rangka Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan, tertanggal 07 Desember 2020, Nomor 02, dibuat di hadapan CATHERINA SITUMORANG, SH., Notaris di Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP/T", Pemegang saham Perseroan memusatkan:

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Likuidator Perseroan dalam proses likuidasi Perseroan;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Likuidator Perseroan atas tindakan pengurusan likuidasi Perseroan yang dijalanikannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator;
3. Menyetujui dan mengesahkan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari jabatan mereka masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan itu memberikan pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dari jabatan mereka masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan mereka selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan atau Neraca Perseroan.

Demikian disampaikan.

Jakarta, 15 Desember 2020  
**PT. KIRAN RESOURCES INDONESIA (dalam Likuidasi)**  
Ttd.  
Likuidator Perseroan